

**PERKEMBANGAN *FIVE POWER DEFENCE ARRANGEMENTS* DALAM  
MENANGGAPI DINAMIKA KEAMANAN ASIA TENGGARA PASCA PERANG  
DINGIN**

**Caroline Putri Pratama**  
**Seoul National University**  
**Email: pratama.caroline@yahoo.com**

**Darang Sahdana Candra**  
**ASEAN Study Center, Universitas Indonesia**  
**Email: darang.sahdana@ui.ac.id**

**Abstrak**

*The Five Power Defence Arrangements (FPDA) is a regional security institution in Southeast Asia, with Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, and United Kingdom as its members. As one of the oldest, and still existing, regional security institution in the Southeast Asia region, FPDA's existence seems to be unheard of, compared to the region's Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) or even the Cold War's Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Although FPDA was created in the height of the Cold War, as well as in response to the potential hegemonic Indonesian threat to former British colonies, the institution is still exist even after both original existential threat wanes. In the end, how the FPDA can maintain its existence in the changing security dynamics in the region, especially after the end of the Cold War, is an interesting piece of puzzle to be solved.*

**Kata kunci**

*FPDA, security, Southeast Asia, military.*

**Dinamika Keamanan di Asia Tenggara dan Keberadaan FPDA**

Ketika membahas institusi yang berperan dalam dinamika keamanan di Asia Tenggara, hal pertama yang muncul adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang berdiri pada tahun 1967. Jika dilihat secara sekilas, tidak terlihat adanya institusi regional lain di Asia Tenggara selain ASEAN. Kawasan Asia Tenggara sebenarnya pernah dan masih memiliki institusi-institusi keamanan selain ASEAN dengan peran mereka sendiri-sendiri, seperti *Asian-Pacific Council* (ASPAC, 1966-1974), *Asia-Pacific*

*Economic Cooperation* (APEC, 1989-sekarang), *Five Power Defence Arrangements* (FPDA, 1971-sekarang), *Maphilindo* (1963-1966), dan *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO, 1954-1977).<sup>i</sup> Dari kelima institusi tersebut, hanya dua yang hingga saat ini masih bertahan, yakni: APEC dan FPDA. Karena APEC lebih fokus pada kerjasama ekonomi, FPDA menjadi satu-satunya institusi keamanan regional selain ASEAN di Asia Tenggara yang masih bertahan dan masih memiliki peran di kawasan.

FPDA memang jarang terdengar dalam pembahasan mengenai dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara. Bristow menyebut institusi keamanan regional ini sebagai *Southeast Asia's unknown regional security organisation* atau “organisasi keamanan regional Asia Tenggara yang tidak dikenal.”<sup>ii</sup> Penilaian tersebut tidaklah mengherankan karena FPDA tenggelam dalam berbagai pemberitaan mengenai ASEAN. FPDA, yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pada awalnya merupakan institusi forum konsultasi yang tidak memiliki relevansi bagi dinamika keamanan di Asia Tenggara. FPDA yang telah berusia lebih dari 40 tahun ternyata mampu bertahan dan memiliki peran tersendiri dalam dinamika keamanan di Asia Tenggara. Mengapa institusi yang sebenarnya merupakan peninggalan masa Perang Dingin ini masih dapat bertahan di Asia Tenggara? Apakah terdapat perubahan atau transformasi sehingga institusi ini mampu bertahan dalam merespons dinamika keamanan Asia Tenggara pasca Perang Dingin yang sedemikian kompleks?

Tulisan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama menjelaskan kerangka konseptual *Regional Security Complex*<sup>iii</sup> atau kompleks keamanan regional yang akan digunakan untuk menelaah transformasi dan peran FPDA. Bagian kedua membahas kondisi keamanan domestik serta hubungan antar-negara di kawasan Asia Tenggara pada periode Perang Dingin dan pasca Perang Dingin dan menganalisisnya dengan menggunakan teori kompleks keamanan kawasan untuk menunjukkan pola hubungan yang dominan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada bagian ketiga, dilakukan pembahasan yang lebih detail mengenai FPDA sebagai satu-satunya bentuk pengaturan keamanan kolektif (*collective security*) di kawasan Asia Tenggara. Pada bagian akhir, tulisan ini mengkritisi perkembangan FPDA dalam merespon dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin.

## Kompleks Keamanan Kawasan

Teori kompleks keamanan kawasan memberi penekanan pada signifikansi kawasan (region) dalam memahami dinamika keamanan internasional. Buzan mendefinisikan kompleks keamanan regional sebagai sekumpulan negara yang karena satu dan lain hal memiliki kedekatan sehingga membuat *primary security* (keamanan yang diutamakan di) negara-negara tersebut tergabung dan tidak dapat dipisahkan.<sup>iv</sup> Kawasan dalam teori ini tidak hanya mengacu pada pengertian secara geografis atau teritori negara, tetapi pada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya dan, karena itu, menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak dapat dianalisis secara terpisah.<sup>v</sup>

Analisis mengenai kompleks keamanan kawasan menjadi penting karena pada level regional ini terjadi *interplay* antara keamanan nasional dengan keamanan global.<sup>vi</sup> Pada level regional, terjadi interdependensi keamanan yang dibangun oleh berbagai faktor, seperti: sejarah, geografi, budaya, ekonomi, dan politik. Sebuah kompleks keamanan kawasan, menurut teori ini, diwarnai oleh pola *amity* (kerjasama) atau *enmity* (persaingan) di antara negara-negara di kawasan. Kedua pola tersebut dapat dianalisis dengan melibatkan faktor domestik dan global di dalamnya. Pada akhirnya, unsur yang penting dalam pembentukan kompleks keamanan kawasan adalah adanya interdependensi dan hubungan kerjasama keamanan antar-negara di suatu kawasan.<sup>vii</sup> Namun, Buzan dan Wæver tidak menyangkal kemungkinan adanya hubungan persaingan, perimbangan kekuasaan, berbagai bentuk aliansi, serta masuknya kekuatan eksternal ke dalam suatu kompleks keamanan kawasan.<sup>viii</sup>

Untuk mengidentifikasi dan menaksir kondisi keamanan regional, Buzan dan Wæver menjabarkan empat variabel penyusun struktur kompleks keamanan kawasan, yakni: batas wilayah (yang membedakan suatu kompleks keamanan kawasan dengan kawasan tetangganya), struktur anarki (bahwa kompleks keamanan kawasan harus terdiri dari dua atau lebih unit otonom), polaritas (adanya distribusi *power* antar-unit), dan konstruksi sosial (meliputi pola persepsi permusuhan-kerjasama antar-unit). Keempat faktor tersebut dapat dilihat melalui empat level analisis, yakni: level domestik negara-negara dalam kawasan, pola relasi antar-negara dalam kawasan, interaksi dengan kawasan yang berdekatan, dan peran *global powers* (negara-negara *superpowers* dan *great powers*) yang ikut berperan di

kawasan. Dari analisis keempat variabel penyusun struktur kompleks keamanan kawasan dalam level analisis dan rentang waktu tertentu, terdapat tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kompleks keamanan kawasan, yakni: bertahannya *status quo* (tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kompleks keamanan kawasan), transformasi internal (perubahan dalam batas kawasan, seperti perubahan struktur anarki karena integrasi regional, perubahan polaritas, ataupun perubahan pola permusuhan-kerjasama), dan transformasi eksternal (perubahan dari luar batas kawasan seperti perubahan anggota kompleks keamanan kawasan karena penggabungan dengan kawasan lain atau karena perpecahan suatu kompleks keamanan kawasan).

Selain itu, dalam suatu kompleks keamanan kawasan dapat ditemukan bentuk pengaturan keamanan kawasan (*regional security arrangement*) tertentu yang merupakan upaya negara-negara di kawasan untuk mengusahakan terciptanya keteraturan dan keamanan dalam kawasan mereka dengan cara bekerjasama dalam bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan kompleksitas keamanan kawasan tersebut. Interdependensi dan kesadaran akan perlu dibangunnya hubungan kerjasama di bidang keamanan antar-negara dalam suatu kompleks keamanan kawasan umumnya berlandaskan pada dua hal, yakni: kesadaran bahwa stabilitas struktur keamanan di satu negara akan mempengaruhi stabilitas keamanan negara-negara lain dalam kawasan yang sama dan dominasi negara-negara *superpower* dalam level global akan mengancam pertahanan dan keamanan kawasan dan pada akhirnya akan memicu ketegangan dan konflik antar-negara di kawasan tersebut.

### **Analisis Kompleks Keamanan Kawasan Asia Tenggara**

Pada dasarnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, selain Thailand, memiliki kesamaan karakteristik sebagai negara baru yang muncul dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia II. Setelah kemerdekaan, kondisi keamanan domestik di negara-negara tersebut diwarnai dengan perang sipil dan persaingan pengaruh antara dua kekuatan besar di Blok Barat dan Blok Timur.<sup>ix</sup> Hal tersebut terjadi di Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia.<sup>x</sup> Pasca Perang Dunia II, pola hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara belum terlihat dengan jelas karena negara-negara tersebut cenderung fokus untuk mengatasi masalah internalnya. Namun, pada periode awal Perang Dingin, mulai muncul pola permusuhan di Asia Tenggara. Pola tersebut dapat dilihat dari, setidaknya, dua indikator, yaitu: pelaksanaan politik luar negeri Konfrontasi oleh Indonesia

GLOBAL Vol. 16 No. 1 Mei 2014 37

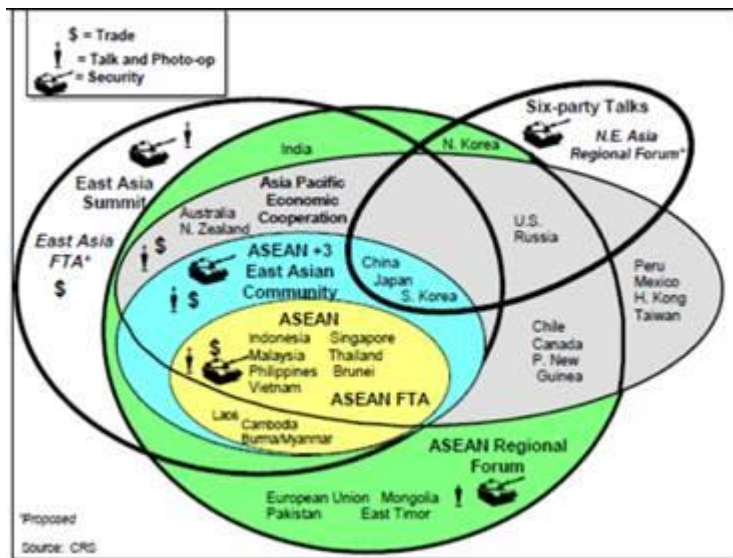
pada masa kepemimpinan Sukarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia dan perang antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan.<sup>xi</sup> Politik luar negeri Konfrontasi yang dijalankan Indonesia pada masa itu bertujuan untuk membatasi pengaruh dan imperialisme kekuatan asing di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai bentuk dari kedua hal tersebut.<sup>xii</sup> Pergantian kepemimpinan Indonesia pada tahun 1965 mengubah politik luar negerinya dengan menjadikan kestabilan politik regional sebagai fokus utama untuk meningkatkan perekonomian.<sup>xiii</sup>

Di tengah situasi Perang Dingin yang ditandai dengan perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Timur, pola hubungan antar-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami perubahan besar dengan dibentuknya ASEAN melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kelima negara tersebut memiliki kecenderungan pro-Blok Barat serta berupaya untuk menangkal pengaruh komunis dan juga Cina di kawasan Asia Tenggara.<sup>xiv</sup> Setelah berakhirnya Perang Dingin, kondisi keamanan domestik dan pola hubungan antar-negara di Asia Tenggara kembali berubah. Perang sipil pecah di Kamboja, separatisme marak terjadi di Indonesia, dan krisis ekonomi mengakibatkan ketidakstabilan di Filipina, Thailand, dan Malaysia.<sup>xv</sup> Berakhirnya Perang Dingin juga mengubah pola hubungan negara-negara di Asia Tenggara dari pola konflik menjadi pola kerjasama yang terlihat dari bergabungnya negara-negara yang tadinya berusaha ditangkal oleh ASEAN seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam ke dalam institusi tersebut.<sup>xvi</sup> Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya kekuatan dan pengaruh Uni Soviet dari kawasan Asia Tenggara yang membuat Vietnam terjepit antara Cina dan ASEAN. Vietnam, setelah menarik pasukannya dari Laos pada tahun 1988 dan Kamboja pada tahun 1989, bersama dengan negara-negara di bawah pengaruhnya kemudian masuk ke ASEAN sebagai pilihan untuk menghadapi Cina di masa yang akan datang.<sup>xvii</sup>

Berdirinya ASEAN menandai munculnya pola kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Pola kerjasama tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi kerawanan domestik negara-negara di kawasan yang sebagian besar berfokus pada usaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik di negaranya masing-masing. Perluasan persepsi keamanan pada periode pasca Perang Dingin, misalnya isu separatisme yang dianggap mengancam keamanan negara, juga berpengaruh terhadap interaksi antar-negara di kawasan. Berkurangnya pengaruh *superpowers* di kawasan Asia Tenggara juga menyebabkan menurunnya tensi persaingan atau permusuhan di kawasan dan mendorong keinginan

negara-negara Asia Tenggara untuk bekerjasama. Dengan demikian, pada masa pasca Perang Dingin, pola kerjasama di kawasan menjadi lebih dominan karena bergesernya isu kerawananan domestik serta menurunnya keterlibatan *superpowers* di kawasan yang meningkatkan interaksi positif antar-negara di kawasan Asia Tenggara.

**Gambar 1: Institusi-Institusi di Kawasan Asia-Pasifik**



Sumber: Nanto. 2008

Kawasan Asia Tenggara tidak pernah dapat terlepas dari keterkaitan dengan kawasan lain yang berdekatan, terutama kawasan Asia Timur dan Pasifik Selatan. Buzan dan Wæver menjelaskan bahwa keberadaan SEATO dan FPDA merupakan contoh keterkaitan antara kawasan ini dengan kawasan tetangganya.<sup>xviii</sup> Seperti dapat dilihat pada Gambar 1, kawasan Asia Tenggara, yang berpusat di ASEAN, memiliki berbagai bentuk institusi kerjasama dengan negara-negara di kawasan lain. Pola hubungan antar-kawasan yang kuat juga ditemui di Asia Tenggara dengan adanya berbagai sengketa teritorial antara negara-negara di kawasan dengan negara di kawasan lain. Sengketa atas Laut Cina Selatan menjadi contoh nyata keterkaitan tersebut. Sebagai kawasan yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kawasan lain, ditambah dengan posisi geostrategis dan geopolitis yang signifikan dalam hubungan internasional, Asia Tenggara juga tidak luput dari kepentingan kekuatan-kekuatan global.

## **FPDA sebagai Bentuk Keamanan Kolektif dan Perkembangannya**

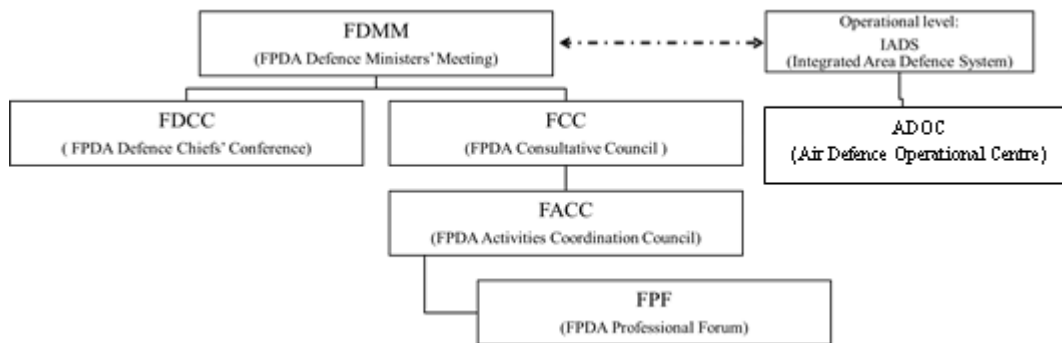
Keamanan kolektif (*collective security*) adalah bentuk pengaturan keamanan antar-negara yang berangkat dari pendekatan Neoliberal Institusionalisme. Snyder mendefinisikan keamanan kolektif sebagai bentuk pengaturan keamanan yang beranggotakan negara-negara, tidak harus *like-minded states*, yang setuju untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menangani perbedaan diantara mereka serta merespons secara kolektif segala pelanggaran terhadap aturan tersebut.<sup>xxix</sup> Selain itu, negara-negara dalam keamanan kolektif juga berkomitmen untuk membantu pertahanan anggotanya dalam merespons agresor.<sup>xxx</sup> Berbeda dengan aliansi yang bertujuan melakukan *balancing* terhadap agresor, yang sudah dapat diidentifikasi sebelum terjadinya agresi, dengan langkah militer, keamanan kolektif lebih bertujuan untuk menimbulkan efek gentar (*deterrent effect*) dengan cara meyakinkan bahwa agresor akan menghadapi pasukan sekutu dalam jumlah yang besar yang pengerahannya berlandaskan pada keputusan politik.<sup>xxxi</sup> Keamanan kolektif juga berupaya mengubah perilaku negara dalam berinteraksi yang diwujudkan melalui kerjasama untuk meningkatkan kepercayaan diantara anggotanya sehingga dilema keamanan antar-anggota dapat diatasi.<sup>xxii</sup>

FPDA berdiri pada November 1971 dan merupakan penerus dari *Anglo-Malayan Defence Agreement* (pada tahun 1963 berganti nama menjadi *Anglo-Malaysian Defence Agreement*) dan beranggotakan 5 (lima) negara, yakni: Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.<sup>xxiii</sup> Institusi tersebut didirikan sebagai respons atas kebijakan Inggris yang akan menarik pasukannya dari wilayah di timur Terusan Suez yang membuat Malaysia dan Singapura khawatir mengingat dua negara tersebut relatif baru dan tidak sekuat negara-negara tetangganya yang cenderung agresif seperti Indonesia dan Vietnam.<sup>xxiv</sup> Meskipun Singapura melepaskan diri dari Malaysia pada tahun 1965, negara ini tetap terikat pada kesepakatan tersebut karena pertahanan kedua negara tidak dapat dipisahkan (*indivisible*).

Pada awal pendiriannya, FPDA hanya berbentuk forum konsultasi, bukan aliansi, serta hanya bertujuan agar kelima negara anggota dapat berkonsultasi satu sama lain dalam waktu secepat mungkin manakala terjadi serangan dari pihak eksternal terhadap Malaysia atau Singapura dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil.<sup>xxv</sup> Untuk mendukung langkah tersebut, dibentuk pula IADS, *Integrated Air Defence System*, di pangkalan militer

Angkatan Udara Diraja Malaysia di Kota Butterworth, yang merupakan sistem pertahanan udara gabungan bagi wilayah Malaysia dan Singapura. IADS sendiri kemudian menjadi markas bagi pasukan dari kelima negara anggota FPDA. Komandan IADS, yang selalu dijabat oleh Wakil Marsekal Angkatan Udara Australia, diberi wewenang untuk menggunakan pasukan dari kelima negara anggota FPDA apabila terjadi serangan mendadak terhadap Malaysia atau Singapura.<sup>xxvi</sup> Dalam perjalanannya, FPDA berkembang dan tidak lagi sebatas forum konsultasi biasa. Struktur organisasi FPDA menyesuaikan diri dengan dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara. Saat ini terdapat 5 (lima) struktur utama dan 2 (dua) struktur operasional dalam pengorganisasian FPDA (lihat Gambar 2).

**Gambar 2. Struktur Pengorganisasian FPDA<sup>xxvii</sup>**



Digambarkan oleh para penulis dengan merujuk pada penjelasan dalam Thayer. 2007, hlm. 83-84.

FDMM adalah badan pembuat kebijakan tertinggi dalam FPDA yang pertemuannya diadakan setiap 3 tahun sekali. FDMM dihadiri oleh menteri pertahanan dari kelima anggota FPDA dan Komandan IADS. FDMM bertugas untuk menyediakan arah kebijakan FPDA. Badan tinggi lainnya, FDCC, bertugas memberikan laporan dan nasihat profesional bagi FDMM. FDCC diadakan sekali dalam setahun dan dihadiri oleh Komandan IADS. FCC merupakan badan yang bertugas untuk menyusun anggaran, perencanaan, dan kebijakan bagi FPDA. FCC diadakan dua kali dalam setahun dan diketuai oleh menteri pertahanan Singapura dan Malaysia serta dihadiri oleh komisioner tinggi dari 3 negara lainnya. FACC merupakan kelanjutan dari FCC dimana para petinggi militer negara-negara anggota FPDA harus melaksanakan keputusan-keputusan dari FCC, biasanya dalam bentuk latihan militer. Terakhir, FPF merupakan seminar tahunan yang membahas taktik operasional dan isu-isu teraktual bagi FPDA. Selain struktur di atas, FPDA juga memiliki komponen operasional



berupa IADS yang memiliki 50 personel militer sebagai staf di markas pusatnya yang berasal dari seluruh negara anggota FPDA. Ada pula ADOC yang merupakan pusat operasional IADS yang dilengkapi dengan peralatan kontrol dan komunikasi berteknologi tinggi.

Dari penggambaran tersebut, terlihat bahwa FPDA memiliki karakteristik pengaturan keamanan kolektif. FPDA memiliki karakter *unidentified threat* meskipun pembentukannya didorong oleh adanya persepsi ancaman terhadap Indonesia, bersifat *counter-deterrence* yang defensif dan tidak berupaya memancing dilema keamanan karena memiliki postur pasukan yang defensif dan tidak mengancam, serta berdasarkan pada pandangan Neoliberal Institutionalisme dimana suatu negara perlu bekerjasama dengan negara lain untuk menjaga keamanannya. Sebagai sebuah keamanan kolektif, FPDA memiliki beberapa kontribusi terhadap stabilitas kawasan.<sup>xxviii</sup> Pertama, FPDA memiliki fungsi sebagai institusi utama yang melakukan *confidence building* antara Malaysia dengan Singapura yang awalnya memiliki sikap permusuhan yang tinggi. Kedua, FPDA juga berperan memiliki efek gentar psikologis (*psychological deterrent*) bagi agresor yang ingin menyerang Malaysia atau Singapura. Jika ada agresor yang menyerang kedua negara tersebut maka Inggris, Australia, dan Selandia Baru akan merespon dengan kekuatan militernya. Keterlibatan Inggris serta Australia akan mendorong keterlibatan Amerika Serikat karena adanya perjanjian keamanan bilateral antara Inggris dan Australia dengan Amerika Serikat.<sup>xxix</sup> Ketiga, FPDA, melalui berbagai latihan militer yang dilaksanakan, meningkatkan kemampuan militer negara-negara anggotanya, terutama Malaysia dan Singapura. Latihan militer bersama yang dilakukan secara reguler dan melibatkan berbagai matra (lintas-matra) tersebut juga meningkatkan kemampuan militer untuk beroperasi di bawah satu komando.<sup>xxx</sup>

### **FPDA Pasca Perang Dingin**

Berdasarkan teori Kompleks Keamanan Kawasan, dapat dilihat bahwa pola hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada periode Perang Dingin lebih diwarnai oleh pola permusuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari politik luar negeri Konfrontasi Indonesia, berpisahnya Singapura dari Malaysia, hingga peperangan di Vietnam yang juga melibatkan Laos dan Kamboja. Pola hubungan permusuhan masih berlanjut setelah pembentukan ASEAN ketika negara-negara anggota ASEAN tetap melihat

negara-negara komunis di bawah pengaruh Vietnam sebagai ancaman. Negara-negara anggota ASEAN pada awalnya masih memiliki keraguan mengenai intensi anggota yang lain, terutama Malaysia dan Singapura yang mengalami sejarah buruk dengan Indonesia di masa Konfrontasi. Dalam kondisi tersebut FPDA dibentuk dengan tujuan menyediakan perlindungan bagi Malaysia dan Singapura setelah pasukan Inggris ditarik dari wilayah sebelah timur Terusan Suez. FPDA kemudian berperan besar dalam mewujudkan profesionalisme militer Malaysia dan Singapura melalui berbagai latihan militer yang dilaksanakan.<sup>xxxii</sup> Malaysia dan Singapura juga diuntungkan dengan adanya efek gentar yang disediakan oleh FPDA.<sup>xxxiii</sup>

Meskipun normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura sudah berlangsung pasca pergantian pemerintahan dari Sukarno ke Suharto, kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kedua negara tersebut dengan Indonesia masih tetap ada. Apalagi, ketika Indonesia menganeksasi Timor Leste pada tahun 1975, Malaysia dan Singapura mempersepsikan hal tersebut sebagai ambisi hegemonik Indonesia.<sup>xxxiii</sup> Indonesia sendiri melihat FPDA secara skeptis dan menganggapnya sebagai jaminan atas ketakutan kembalinya Indonesia ke masa lalu (pada pemerintahan Sukarno).<sup>xxxiv</sup> Efek gentar yang dimiliki FPDA juga cukup kuat. Pada tahun 1994, Menteri Pertahanan Indonesia, Benny Moerdani, menyatakan bahwa “apabila FPDA membuat negara-negara anggotanya merasa aman maka keamanan regional akan meningkat dan Indonesia pun senang.”<sup>xxxv</sup> Hal tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang pada akhirnya melihat Malaysia dan Singapura memang diuntungkan dengan adanya FPDA dan Indonesia menjadi segan untuk melakukan tindakan ofensif terhadap kedua negara tersebut.

Berakhirnya Perang Dingin membuat FPDA mau tidak mau melakukan transformasi sebagai respons terhadap dinamika keamanan kawasan di Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan perubahan pola hubungan negara-negara di Asia Tenggara dari permusuhan menjadi kerjasama. FPDA pun bertransformasi dari sebuah institusi keamanan kolektif yang bertujuan melakukan tindakan defensif apabila terjadi serangan terhadap Malaysia dan Singapura menjadi institusi keamanan yang menaruh perhatian pada stabilitas keamanan regional terutama pada bidang keamanan non-konvensional seperti terorisme dan keamanan maritim. Perubahan tersebut dimulai dari tahun 1988 ketika para menteri pertahanan negara anggota FPDA sepakat bahwa institusi yang tadinya hanya forum konsultasi dengan sedikit latihan militer bersama ini harus direvitalisasi. Pada FDMM tahun GLOBAL Vol. 16 No. 1 Mei 2014

2000, FPDA mengalami transformasi besar dengan diubahnya IADS, *Integrated Air Defence System*, yang sebelumnya hanya fokus pada pertahanan udara menjadi *Integrated Air Defence System* yang terdiri dari pertahanan trimatra (darat, laut, udara).<sup>xxxvi</sup> FDMM tahun 2000 juga menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan kerjasama operasional antar-militer dari masing-masing negara dengan meningkatkan latihan militer secara reguler dalam bentuk latihan militer bersama trimatra.<sup>xxxvii</sup>

FPDA juga berevolusi dengan keputusan-keputusan yang diambil pada tahun 2003 dan 2004. Pada FDMM tahun 2003, FPDA menyatakan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan inter-operabilitas pasukan untuk mewujudkan stabilitas regional. Pada tahun yang sama, FDMM juga mengeluarkan keputusan yang membuat FPDA harus memperhatikan ancaman-ancaman asimetris, terutama terorisme dan pembajakan di Selat Malaka.<sup>xxxviii</sup> Sementara itu, pada *Shangri-la Dialogue* di Singapura tahun 2004, menteri-menteri pertahanan negara anggota FPDA menyetujui perubahan latihan militer rutin FPDA dengan menambahkan skenario-skenario ancaman non-konvensional dan memfokuskan latihan pada keamanan maritim.<sup>xxxix</sup> Di tahun yang sama, FPDA juga menginisiasi kebijakan pertukaran informasi intelijen mengenai ancaman keamanan non-konvensional secara reguler antar-negara anggotanya. Latihan-latihan militer dengan fokus pada penangkalan terorisme dan menjamin keamanan maritim terbukti berperan positif dalam patroli laut *Malacca Strait Patrol Initiative* yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kekuatan angkatan laut serta angkatan udara Malaysia dan Singapura yang terlatih oleh berbagai latihan militer FPDA jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kemampuan angkatan laut dan udara Indonesia.<sup>xl</sup>

FPDA juga berperan sebagai tambahan bagi agenda ASEAN *Defence Ministers' Meeting* terutama dalam kaitannya dengan kesiapan militer negara-negara ASEAN untuk menanggulangi bencana dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dua bidang tersebut telah menjadi bagian dari latihan militer rutin FPDA sejak tahun 2006 sebagai respon atas bencana tsunami melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 2004.<sup>xli</sup> Pada perayaan ulang tahunnya yang ke-40 bulan November 2011 yang lalu, FPDA melaksanakan latihan militer yang diberi nama Operasi Bersama Lima yang melibatkan 4.000 personel militer, 67 pesawat tempur, 18 kapal perang, 2 kapal selam, serta berbagai elemen militer lainnya untuk menghadapi ancaman dalam konteks yang luas (*multi-threat*) baik ancaman konvensional maupun ancaman non-konvensional.<sup>xlii</sup> Ulang tahun ke-40 FPDA juga dirayakan dengan

penerbitan Dokumen Stocktake oleh FDMM yang berisi target-target untuk meningkatkan kapabilitas bersama dan inter-operabilitas serta mengadakan latihan militer rutin untuk menghadapi ancaman non-konvensional.<sup>xliii</sup> Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa FPDA telah bertransformasi dalam menghadapi dinamika keamanan di Asia Tenggara pasca Perang Dingin.

## Penutup

FPDA merupakan institusi keamanan kolektif di Asia Tenggara yang memiliki peran penting bagi perkembangan militer serta pertahanan Malaysia dan Singapura. Perubahan pola hubungan di kompleks keamanan kawasan Asia Tenggara dari permusuhan ke kerjasama pada periode pasca Perang Dingin turut mempengaruhi transformasi institusi FPDA. FPDA berkembang dari sekedar forum konsultasi untuk merespons kemungkinan serangan terhadap Malaysia dan Singapura menjadi institusi yang berupaya mewujudkan kestabilan keamanan kawasan Asia Tenggara. FPDA saat ini berupaya merespons ancaman keamanan non-konvensional, terutama terorisme dan bajak laut di Selat Malaka, melalui latihan-latihan militernya.

---

<sup>i</sup> William T. Tow. 1993. "Contending Security Approaches in the Asia-Pacific Region." *Security Studies*, Vol. 3, Issue 1, hlm. 81-86.

<sup>ii</sup> Damon Bristow. 2005. "The Five Power Defence Arrangements: Southeast Asia's Unknown Regional Security Organization." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 27, No. 1, hlm. 6.

<sup>iii</sup> Teori *Regional Security Complex* diambil dari Barry Buzan dan Ole Wæver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 40-82.

<sup>iv</sup> Barry Buzan. 1991. *People, States, and Fear*. London: Harvester Wheatsheaf, hlm. 190.

<sup>v</sup> Buzan dan Wæver. *Op.Cit.*, hlm. 44.

<sup>vi</sup> *Ibid.* hlm. 43.

<sup>vii</sup> Barry Buzan, et.al., 1990. *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*. London: Pinter.

<sup>viii</sup> Buzan dan Wæver. *Op.Cit.* hlm. 47.

<sup>ix</sup> Barry Buzan dan Lene Hansen, *Op.Cit.* hal. 129.

<sup>x</sup> *Ibid.* hlm. 130.

<sup>xi</sup> Alan Collins. 2000. *Security Dilemmas of Southeast Asia*. London: Macmillan, hlm. 97.

<sup>xii</sup> *Ibid.*

<sup>xiii</sup> Buzan dan Hansen, *Op.Cit.* hlm. 134.

<sup>xiv</sup> *Ibid.*

<sup>xv</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>xvi</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>xvii</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>xviii</sup> Buzan dan Wæver. *Op.Cit.*, hlm. 136.

<sup>xix</sup> Craig A. Snyder. 1997. "Regional Security Structures." Craig A. Snyder. (ed.). *Contemporary Security and Strategy*. London: Deakin University Press, hlm. 107.

<sup>xx</sup> *Ibid.*

- 
- <sup>xxi</sup> *Ibid.* hlm. 108.
- <sup>xxii</sup> *Ibid.*
- <sup>xxiii</sup> Chin Kin Wah. 1974. "Rearranging Five Power Defence Arrangements: The Process of Continuing Adjustments in 1973." *Southeast Asian Affairs*, hlm. 15.
- <sup>xxiv</sup> *Ibid.*
- <sup>xxv</sup> Carlyle A. Thayer. 2007. "The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever." *Security Challenges*, Vol. 3, No. 1, hlm. 81.
- <sup>xxvi</sup> *Ibid.*
- <sup>xxvii</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84, ilustrasi oleh penulis.
- <sup>xxviii</sup> Thayer, *Op.Cit.* hlm. 92.
- <sup>xxix</sup> Chin Kin Wah. 1971. "The Five Power Defence Arrangements: Twenty Years After." *The Pacific Review*, Vol. 4, No. 3, hlm. 194.
- <sup>xxx</sup> Thayer, *Op.Cit.*
- <sup>xxxi</sup> *Ibid.* hlm.93.
- <sup>xxxii</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxiii</sup> Ralf Emmers. 2010. "The Role of Five Power Defence Arrangements in Southeast Asia Security Architecture." *RSIS Working Paper*, No. 195, hlm. 9.
- <sup>xxxiv</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxv</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxvi</sup> Thayer, *Op.Cit.* hlm. 88.
- <sup>xxxvii</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxviii</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxix</sup> Ministry of Defence Singapore. "2nd FPDA Defence Ministers' Informal Meeting." diakses dari [http://www.mindef.gov.sg/imindef/news\\_and\\_events/nr/2004/jun/07jun04\\_nr.html](http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2004/jun/07jun04_nr.html).
- <sup>xl</sup> Kate Boswood. 2007. "Engaging Our Interest: The Five Power Defence Arrangements and Its Contribution to Regional Security." *Defence Magazine*, Issue 9, hlm. 36.
- <sup>xli</sup> Emmers, *Op.Cit.* hlm. 21.
- <sup>xlii</sup> Ministry of Defence Singapore. 'Singapore Hosts FPDA 40th Anniversary Celebrations', *Loc.cit.*
- <sup>xliiii</sup> Department of Defence Australia. "Minister for Defence – Five Power Defence Arrangements Visit to Singapore and Malaysia." diakses dari <http://www.minister.defence.gov.au/2011/11/03/minister-for-defence-five-power-defence-arrangements-visit-to-singapore-and-malaysia/>